

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP ANGGARAN BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU

Nihayatul Fitriana¹, Sudarti Sudarti

Abstract *The purpose of this research is to know the effect of Local Revenue, Profit Sharing Fund and Population to the allocation of Capital Expenditure of regency / city in Riau Province in 2012-2016. The population used in this study is all districts / cities in Riau Province, amounting to 10 districts and 2 cities, with data sources from BPS. This test uses multiple linear regression analysis techniques with the help of Eviews application. The result with multiple linear regression research shows that the local revenue, profit sharing and population influence on the allocation of capital expenditure with R-Square of 0.87 or 87% that the variables in the research model can predict the allocation of capital expenditure while 13% by other variables outside the research model.*

Keywords : *Local Revenue, Revenue Sharing Fund, total population, Capital Expenditure.*

Abstrak Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal kabupaten/kota di Provinsi Riau pada tahun 2012-2016. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau yang berjumlah 10 kabupaten dan 2 kota, dengan sumber data dari BPS. Pengujian ini menggunakan tehnik analisis regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi Eviews. Hasil dengan penelitian regresi linier berganda menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal dengan R-Square sebesar 0,87 atau 87% bahwa variabel dalam model penelitian dapat memprediksi pengalokasian belanja modal sedangkan 13% di pengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk, Belanja Modal.

Pendahuluan

Otonomi daerah yakni pemberian hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sehingga pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi daerah dan mampu untuk mewujudkan kemandirian daerah. Adanya proses otonomi membuat kabupaten/kota untuk menata potensi daerah yang ada, sehingga nantinya akan ada peningkatan potensi dan daya saing antar daerah (Sudarti et all, 2010). Dengan adanya desentralisasi fiskal ini juga di harapkan dapat memperbaiki pelayanan publik sesuai dnegan kondisi ekonomi baik di tingkat pemerintah pusat dan daerah (Tiyaningsih, 2009), dan upaya peningkatan pelayanan publik pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan sejumlah dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset daerah, karena dalam proses pembangunan yang berlandaskan otonomi daerah membuat semua proses pembangunan di serahkan kepada daerah (Nuraini, 2009)

Sesuai dengan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yakni Pendapatan Asli

¹ Universitas Muhammadiyah Malang Kediri Email: nihayatulfitriana@gmail.com

Daerah(PAD), dengan meningkatnya PAD ini di harapkan dapat meningkatkn investasi belanja modal pemerintah.

Namun adanya desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan membuat daerah tidak dapat membiayai seluruh aktivitas atau wewenang yang di berikan, sehingga dukungan dari dana perimbangan sangat di perlukan (abdullah, 1998). Karena transfer dari pemerintah pusat merupakan kewajiban bagi daerah atas adanya desentralisasi (Aisyah, 2014). Maka dari itu sesuai dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Pemerintah daerah mengalokasikan dana perimbangan yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah setelah pelaksanaan desentralisasi. (Kusuma, 2016) menyatakan bahwa “dalam proses pembangunan ekonomi PAD sangat dibutuhkan namun pembangunan tidak akan berjalan jika hanya membebankan kepada pemerintah, sehingga akan terdapat keterbatasan dalam penyediaan prasarana dan layanan kepada masyarakat”

Adanya otonomi daerah masih menunjukkan kinerja pelayanan publik yang masih belum memuaskan (Yandri, 2012). Sehingga pemerintah pusat memberikan bantuan berupa dana perimbangan Dana Bagi Hasil (DBH), dana ini merupakan dana diberikan oleh pemerintah pusat atas berpindahnya hak pemungutan sumber pendapatan daerah kepada pemerintah pusat. Karena semakin tinggi investasi modal diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap merupakan prasaratan utama dalam pemberian pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Dan dengan semakin tinggi dana transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah akan menambah proporsi belanja pemerintah daerah (Eliza & Jatmiko, 2016).

Tabel 1.
Perbandingan Realisasi DBH Pulau Sumatera Tahun 2012 & 2013

No	Daerah	Tahun	
		2012	2013
1	Aceh	1.395.445.433	1.404.101.143
2	Sumatera Utara	1.406.424.611	1.351.121.151
3	Sumatera Barat	588.058.990	504.817.444
4	Riau	11.794.815.112	10.888.238.288
5	Jambi	2.214.917.582	2.332.276.038
6	Sumatera Selatan	6.219.404.770	6.737.454.191
7	Bengkulu	317.367.835	283.037.106
8	Lampung	897.445.773	766.168.819
9	Kep.Riau	600.943.902	3.283.784.805

Sumber :Badan Pusat Statistik di olah 2018

Tabel 1 menunjukkan perbandingan realisasi penerimaan DBH di pulau sumatera yang menunjukkan Provinsi Riau sebagai daerah dengan penerimaan DBH tertinggi di banding dengan daerah lainnya pada tahun 2012 & 2013. Namun sejak di keluarkanya UU No.34/2004

tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, muncul beberapa protes tidak setuju tentang isi undang-undang tersebut. Protes tersebut dilakukan oleh daerah yang kaya dengan SDA seperti NAD, Riau dan Kaltim, tidak setuju dengan ketetapan tentang dana perimbangan. Karena jika dilihat daerah Riau dan Kaltim memiliki komposisi penerimaan tinggi terhadap DBH berbeda dengan daerah lainnya yang masih mengandalkan DAU sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah (Kuncoro, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal 2008 menyatakan DAU, DAK PAD, dan PDRB secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal. Dan secara simultan DAU, DAK, dan PAD berpengaruh terhadap belanja modal namun PDRB tidak berpengaruh. Widiagma (2015) dengan hasil penelitian menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Belanja Modal dengan hubungan yang positif di Provinsi Jawa Timur dengan tahun penelitian 2012-2014. Permatasari (2016) Hasil penelitian menyatakan bahwa PAD, DAU, DBH dan DAK berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran belanja modal di Provinsi Jawa Timur dengan tahun penelitian 2010-2014.

Berbagai data dan informasi menunjukkan bahwa adanya permasalahan dan ketimpangan vertikal antar tingkat pemerintah dan horizontal antara pemerintah yang berdekatan (Pratikno, 1998). Sehingga penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang menggunakan data tahun terbaru yaitu tahun 2012 sampai 2016. Dan penelitian ini menggabungkan penelitian terdahulu sehingga muncul objek penelitian sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk dan Belanja Modal. Dan penelitian ini dilakukan pada kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Teori yang melandasi penelitian ini berdasarkan teori (Mardiasmo, 2002) yang menyatakan "Pendapatan Asli Daerah memiliki peran untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah, guna mencapai tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah". (Bird, 2000) juga mengatakan bahwa "dana perimbangan / transfer di maksudkan untuk mengurangi kesenjangan fiskal, dan mendorong pemerintah daerah dalam pembangunan layanan terhadap masyarakat, atau untuk meningkatkan penyediaan layanan". Infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai akan membuat masyarakat beraktifitas dengan nyaman dan aman sehingga akan berpengaruh terhadap meningkatnya tingkat produktifitas dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan membuat investor untuk membuka usaha di daerah. Sehingga infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai akan berdampak terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah infrastruktur.

Jumlah penduduk sendiri sebagai penikmat layanan yang di berikan oleh pemerintah daerah, sehingga banyaknya jumlah penduduk juga akan mempengaruhi belanja modal hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh (Sukirno, 1985) “Pertumbuhan penduduk yang terjadi mengharuskan pemerintah untuk melakukan penanaman modal yang lebih besar”.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat dan menganalisis bagaimana pengaruh yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Metode Penelitian

Data penelitian menggunakan data sekunder yang berasal dari BPS Provinsi Riau. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua kabupaten/kota yang berada di Riau yaitu berjumlah 12 kabupaten/kota. Variabel yang digunakan yakni Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk sebagai variabel independent dan Belanja Modal sebagai variabel dependen. Dengan menggunakan metode analisis regresi berganda dengan model data panel. Data panel sendiri adalah data yang diperoleh dari menggabungkan antara *cross-section* dengan data *time-series* (Basuki, 2017). Model yang digunakan adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 \dots\dots\dots 1$$

Dimana :

α = Konstanta

β = Slope atau Koefisien Regresi

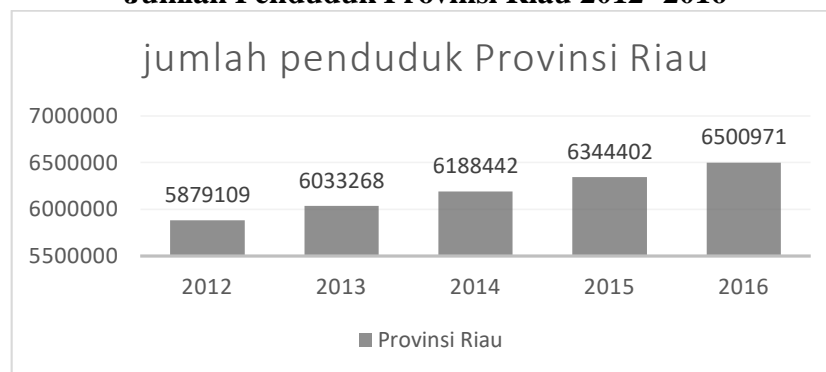
Y = Belanja Modal

Berdasarkan persamaan 1, Belanja Modal (Y1) Merupakan anggaran belanja modal yang telah disusun oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau. Dengan data pertahun yang di dapat dari BPS dengan satuan ribuan rupiah. Pendapatan Asli Daerah (X1) merupakan anggaran yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data pertahun yang didapat dari BPS dengan satuan ribuan rupiah dengan satuan ribuan rupiah. Dana Bagi Hasil (X2) yang digunakan merupakan anggaran Dana Bagi Hasil kabupaten/kota, yang di dapat dari BPS. Data yang digunakan yakni data pertahun yang dinyatakan dalam satuan ribuan rupiah. Merupakan masyarakat yang berdomisili kabupaten/kota di Provinsi Riau yang berkewarganegaraan indonesia dengan rentan usia 0-75+. Sumber yang data jumlah penduduk pertahun didapat dari Badan Pusat Statistik dengan satuan jiwa.

Hasil dan Pembahasan

Riau merupakan salah satu provinsi yang berada di pulau sumatra, Indonesia. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau memiliki luas wilayah sebesar 8.915.016 Ha. Secara administrasi Provinsi Riau terbagi menjadi 10 kabupaten dan 2 kotamadya. Jumlah penduduk Provinsi Riau berjumlah 6.500.971 jiwa dengan distribusi penduduk terpusat di Kota Pekanbaru sekitar 1.054.566 atau 16.38% dari seluruh penduduk Provinsi Riau. Penduduk Provinsi Riau berusia 15 tahun ke atas menurut kabupaten/kota dan kegiatan selama seminggu yang lalu tahun 2015 yakni bekerja sebesar 2.554.296 , pengangguran terbuka sebesar 217.053 dan total angkatan kerja pada tahun 2015 sebanyak 2.771.349 dimana sebagian besar bekerja di bidang pertanian/perkebunan.

Gambar 1.
Jumlah Penduduk Provinsi Riau 2012 -2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, diolah 2018

Pada Gambar 1 menunjukkan jumlah penduduk di Provinsi Riau pada tahun 2012-2016 Yang cenderung mengalami pertumbuhan penduduk tiap tahunnya dengan rata-rata kenaikan sebesar 6189238. Selanjutnya pada tabel 2 di jelaskan data jumlah penduduk kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2012-2016 :

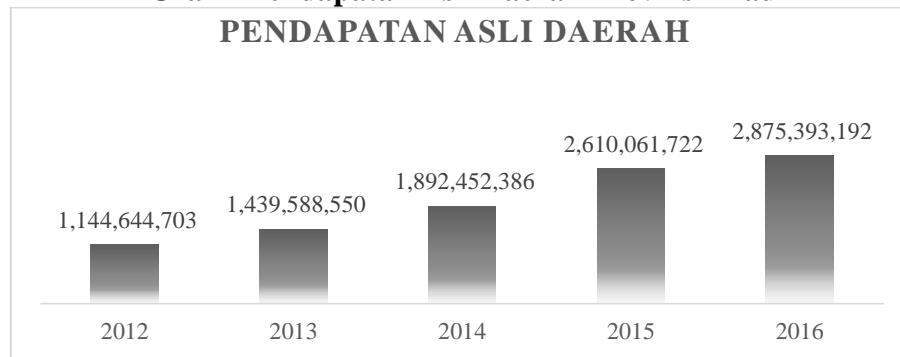
Tabel 2
Data Jumlah Penduduk Kabupaten/kota di Riau

kabupaten/kota	penduduk kabupaten/kota (jiwa)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Bengkalis	519389	527918	537138	543987	551683
indragiri hilir	676419	685530	694614	703734	713034
indragiri hulu	383814	392354	400901	409431	417733
Kampar	733506	753376	773171	793005	812702
kuantan singingi	302631	306718	310619	314276	317935
Pelalawan	339869	358210	377221	396990	417498
rokan hilir	592403	609779	672233	644680	662242
rokan hulu	523024	545483	568576	592278	616466
Siak	404093	416298	428499	440841	453052
kota dumai	268022	274089	280109	285967	291908

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, diolah 2018

Pendapatan asli daerah yakni sumber penerimaan yang diperoleh dari kekayaan asli daerah yang di tarik oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang ada, jumlah penerimaan dan kenaikan peran PAD yang meningkat akan membuat kemandirian daerah meningkat sehingga daerah tidak akan bergantung kepada transfer pemerintah pusat. Jumlah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau dapat di lihat pada gambar 2 :

Gambar 2
Grafik Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, diolah 2018

Berdasarkan gambar gambar 3 dapat kita ketahui jumlah anggaran Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau tahun 2012-2016. Jumlah anggaran Pendapatan Asli Daerah tahun 2012 sebesar Rp1.144.644.703. Jumlah anggaran Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi Rp1.439.588.550, tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi Rp 1.892.452.386. Tahun 2015 anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 2.610.061.722 dan pada tahun 2016 sebesar Rp 2.875.393.192. Jika di lihat dari gambar grafik di atas secara keseluruhan anggaran Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar Rp 1.992.428.111. Jumlah anggaran Pendapatan Asli Daerah menurut kabupaten/kota Provinsi Riau selanjutnya akan dijelaskan dengan lengkap pada tabel 3.

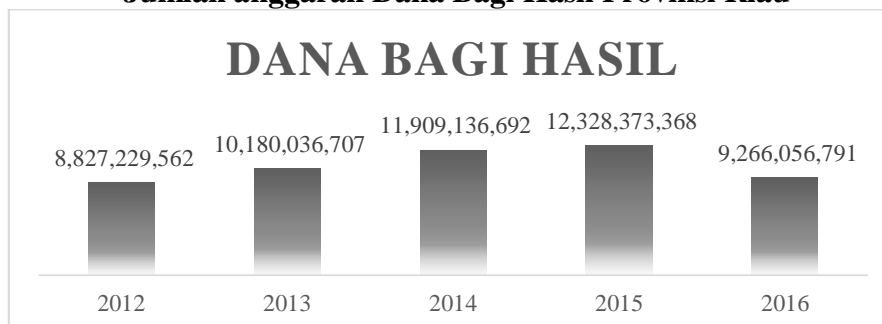
Tabel 3 Jumlah Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Riau Tahun 2012-2016 (dalam ribuan rupiah)

kabupaten/ kota	Tahun									
	2012		2013		2014		2015		2016	
	Δ		Δ		Δ		Δ		Δ	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Bengkalis	206.738.615	8	235.120.650	7	281.445.578	8	337.287.018	9	323.000.667	8
indragiri hilir	49.453.520	4	58.223.809	4	82.115.777	5	108.243.628	6	130.745.947	7
indragiri hulu	27.282.709	3	38.325.189	3	47.451.732	4	80.091.168	6	107.128.764	7
Kampar	101.218.640	6	117.484.861	6	120.637.348	6	147.214.196	7	173.777.605	7
kuantan singingi	26.169.654	3	30.488.054	3	50.156.701	4	67.952.677	5	83.208.830	6
Pelalawan	35.958.602	4	55.891.605	5	92.317.747	6	94.187.971	6	127.878.871	8
rokan hilir	115.854.334	7	134.658.392	7	149.955.845	6	143.632.952	6	179.187.169	7
rokan hulu	33.004.500	3	45.301.092	3	56.768.019	3	97.801.429	6	97.801.429	6
Siak	184.006.640	11	193.661.440	11	266.247.427	13	311.112.375	12	176.855.554	10
kota dumai	89.939.653	10	135.375.872	13	147.133.875	12	152.320.192	13	175.323.814	16
kota pekanbaru	251.338.885	16	364.604.451	19	560.074.583	23	1.010.623.791	34	1.243.438.533	45
kab. meranti	23.679.000	3	30.453.135	3	41.399.000	3	61.464.549	5	57.046.009	4
Provinsi Riau	1.144.644.703	7	1.439.588.550	8	1.892.452.386	8	2.610.061.722	11	2.875.393.192	12

Sumber :Badan Pusat Statisti, diolah 2018

Dana Bagi Hasil merupakan salah satu dana perimbangan yang di berikan oleh pemerintah dalam rangka desentralisasi, yang sesuai dengan UU No.34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil ini bersumber dari sumber daya alam yang daerah namun penarikannya dilakukan oleh pemerintah dan akan di kembalikan lagi kepada daerah sesuai dengan undang-undang. Dana Bagi Hasil sendiri di bedakan menjadi 2 yakni, yang bersumber dari pajak dan daya alam. Jumlah penerimaan Dana Bagi Hasil Provinsi Riau tahun 2012-2016 dapat di lihat pada gambar 3 :

Gambar 3
Jumlah anggaran Dana Bagi Hasil Provinsi Riau



Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, diolah 2018

Dana Bagi Hasil tahun 2012 sebesar Rp 8.827.229.562 dan tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi Rp10.180.036.707, tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi Rp11.909.136.692. Tahun 2015 anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp12.328.373.368 dan pada tahun 2016 turun menjadi Rp9.266.056.791. Jika di lihat dari gambar grafik di atas secara keseluruhan anggaran penerimaan Dana Bagi Hasil Provinsi Riau mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar Rp10.502.166.624. Jumlah anggaran penerimaan Dana Bagi Hasil menurut kabupaten/kota Provinsi Riau selanjutnya akan dijelaskan dengan lengkap pada tabel 4.

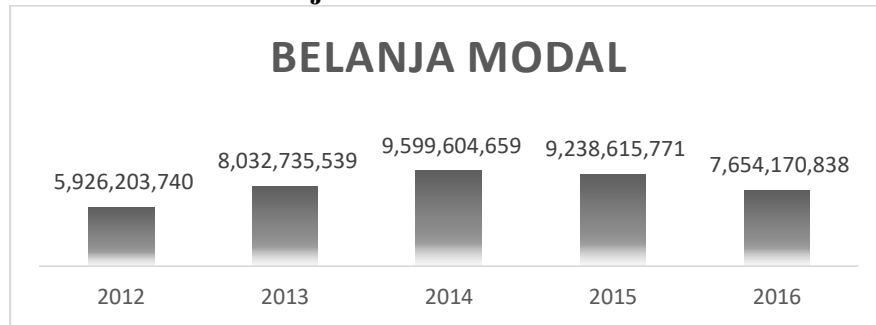
Tabel 4
Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

kabupaten/kota	Tahun									
	2012		2013		2014		2015		2016	
	Δ		Δ		Δ		Δ		Δ	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Bengkalis	2.090.535.000	85	2.952.228.124	90	2.959.384.034	84	3.108.683.559	84	3.196.539.944	80
indragiri hilir	420.618.512	32	475.835.823	33	510.180.013	30	514.349.249	28	259.983.521	13
indragiri hulu	328.558.094	34	368.862.961	33	464.244.681	37	504.972.340	35	332.541.697	22
Kampar	894.246.458	53	969.576.863	49	1.052.192.925	49	1.052.275.889	47	580.308.185	24
kuantan singingi	33.321.828	4	37.824.500	3	421.435.190	34	457.820.935	33	230.412.640	16
Pelalawan	421.433.705	43	456.150.000	40	652.874.349	46	692.631.800	44	453.712.101	28
rokan hilir	1.283.284.832	72	1.314.723.019	68	1.885.344.321	72	1.650.597.539	70	1.603.172.016	61
rokan hulu	528.234.098	48	612.374.118	46	815.453.674	49	700.345.278	44	700.345.278	44
Siak	1.206.200.089	73	1.207.736.747	67	1.384.278.639	66	1.868.437.899	72	951.402.578	53
kota dumai	403.884.229	47	455.801.942	44	583.274.353	48	503.779.183	43	241.208.105	22
kota pekanbaru	433.372.174	27	499.430.269	26	560.204.231	23	575.329.745	19	319.714.073	11
kab.meranti	483.644.085	54	489.071.841	49	620.270.383	50	699.149.952	56	396.716.653	29
Provinsi Riau	8.827.229.562	54	10.180.036.707	53	11.909.136.692	53	10.121.373.368	42	9.266.056.791	38

Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, diolah 2018

Belanja Modal merupakan yang pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap atau investasi yang di bahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan di tetapkan menjadi peraturan daerah. Berikut pada gambar 4 adalah penjelasan mengenai Belanja Modal selama tahun 2012-2016 pada kabupaten/kota di Provinsi Riau :

Gambar 4
Belanja Modal di Provinsi Riau



Sumber :Badan Pusat Statistik, diolah 2018

Berdasarkan gambar grafik 4 dapat kita ketahui jumlah anggaran Belanja Modal Provinsi Riau tahun 2012-2016. Menjelaskan pengeluaran yang di gunakan untuk menambah aset pemerintah daerah pada tahun 2012 Rp5.926.203.740 dan tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp8.032.735.539. Tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp9.599.604.659. Tahun 2015 anggaran Belanja Modal sebesar Rp9.238.615.771 dan pada tahun 2016 menurun menjadi sebesar Rp7.654.170.838. Jika di lihat dari gambar grafik di atas secara keseluruhan anggaran Belanja Modal Provinsi Riau mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar Rp8.631.281.702. Jumlah anggaran Belanja Modal menurut kabupaten/kota Provinsi Riau selanjutnya akan dijelaskan dengan lengkap pada tabel 5.

Tabel 5 Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2012-2016

kabupaten/kota	Belanja Modal					Rata-rata
	2012	2013	2014	2015	2016	
Bengkalis	1.345.269.948	2.079.530.418	2.154.123.709	1.923.258.102	1.532.249.784	1.806.886.392
indragiri hilir	412.828.253	347.392.884	515.122.184	602.252.102	623.615.919	500.242.268
indragiri hulu	254.157.397	467.349.749	565.890.472	523.510.810	380.176.702	438.217.026
Kampar	307.209.496	477.922.730	580.008.591	454.413.160	506.002.123	465.111.220
kuantan singingi	226.886.970	304.507.496	364.621.469	336.448.381	268.291.716	300.151.206
Pelalawan	462.889.122	557.381.612	788.668.363	854.315.179	776.031.784	687.857.212
rokan hilir	1.092.233.074	1.316.225.194	1.315.311.941	996.969.580	931.668.073	1.130.481.572
rokan hulu	334.911.839	426.323.976	528.758.590	367.433.367	367.433.367	404.972.228
Siak	713.793.780	723.824.745	914.043.029	1.228.496.785	629.840.198	841.999.707
kota dumai	158.991.814	320.793.881	408.171.494	240.917.313	139.722.732	253.719.447
kota pekanbaru	286.391.535	491.672.507	882.397.756	1.286.019.417	1.038.505.637	796.997.370
kab.meranti	333.874.692	519.810.347	582.487.061	424.581.575	460.632.803	464.277.296
Riau	5.926.203.740	8.032.735.539	9.599.604.659	9.238.615.771	7.654.170.838	8.090.266.109

Sumber :Badan Pusat Statistik, diolah 2018

Uji Hipotesis

Model terbaik sesuai dengan pemilihan model yang telah di uji yakni adalah model Fixed Effect dengan hasil sebagai berikut :

$$Y = 5,7371 + 0,0237X_1 + 0,1912X_2 + 2,1954X_3$$

Dari hasil pengujian tersebut dapat dilihat bahwa PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Riau, jika PAD naik sebesar 1% maka akan di ikuti juga dengan kenaikan alokasi belanja modal sebesar 23,7%. Juga DBH berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Riau, jika DBH naik sebesar 1% maka akan di ikuti juga dengan kenaikan alokasi belanja modal sebesar 19,12%. Dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Riau, jika Jumlah Penduduk naik sebesar 1% maka akan di ikuti juga dengan kenaikan alokasi belanja modal sebesar 219,54%.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Kepadatan Penduduk terhadap Pengalokasian Belanja Modal Secara Parsial

Berdasarkan uji parsial atau uji t dengan tingkat keyakinan $\alpha = 5\%$, Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara umum Pendapatan Asli Daerah yang di peroleh oleh 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau pada tahun 2012-2016 ini cenderung mengalami peningkatan. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah tertinggi adalah Kota Pekanbaru, sebagai ibukota Provinsi Riau Kota Pekanbaru memungkinkan untuk menggali Pendapatan Asli Daerah. Namun tidak semua pemerintah daerah Kabupaten/kota di Provinsi Riau dapat mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah karena berbedanya kondisi geografis, kepadatan penduduk dan lain sebagainya.

Dari hasil analisis di ketahui Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Anggaran Belanja Modal kabupaten/kota di Provinsi Riau dan terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari Pendapatan Asli Daerah terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada kabupaten/kota di Riau dengan nilai signifikan 0,8305 ($\alpha=0,05$). Dengan demikian Hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal di tolak.

Melihat hasil tersebut menunjukkan PAD merupakan sumber pendapatan yang penting bagi daerah untuk memenuhi belanjanya. Daerah sendiri diharap dapat mengoptimalkan penerimaan daerah, karena Pendapatan Asli Daerah secara statistik berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sehingga bisa menjadi acuan bagi daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah

berperan penting dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu seharusnya daerah lebih optimal lagi dalam menggali sumber-sumber penerimaan sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan memberikan keluasaan kepada daerah untuk mengalokasikan kepada kegiatan atau pengeluaran yang nantinya akan memberikan dampak terhadap peningkatan pembangunan daerah utamanya dalam pembangunan infrastruktur. Namun sayangnya Pendapatan Asli Daerah ini tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap Belanja Modal, dikarenakan PAD pada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau masih relatif kecil di bandingkan dengan penerimaan dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juliani, yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif namun tidak signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara umum Dana Bagi Hasil yang di peroleh 12 kabupaten dan kota di Riau pada tahun 2012-2016 mengalami fluktuatif. Namun penerimaan atas Dana Bagi Hasil sangat besar karena Dana Bagi Hasil sendiri merupakan dana yang di dapat dari sumber-sumber penerimaan daerah baik itu pajak ataupun sumber daya alam. Berdasarkan hasil uji di atas dapat diketahui bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal dengan nilai signifikansi 0,0455 ($\alpha=0,05$). Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal di terima.

Melihat hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa semakin besarnya penerimaan atas Dana Bagi Hasil cenderung akan meningkatkan alokasi belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa masih tingganya pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat. Secara teoritis Dana Bagi Hasil merupakan penerimaan daerah yang potensial apabila digunakan untuk pengalokasian anggaran belanja modal. Hal ini juga dapat menjadi acuan bagi daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi daerah dalam pengelolaan pajak maupun sumber daya alam daerah karena dalam undang-undang juga telah ditetapkan bahwa daerah penghasil akan mendapatkan porsi yang lebih besar dari pada daerah lain, maka diharapkan akan semakin pula bertambahnya pengeluaran yang digunakan untuk belanja modal.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Jumlah Penduduk pada 12 kabupaten dan kota di Riau pada tahun 2012-2016 mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk. Berdasarkan hasil uji diketahui bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal dengan nilai signifikansi 0,0165 ($\alpha=0,05$). Penelitian ini menunjukkan Jumlah Penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi

belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Riau. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tingginya jumlah penduduk akan memerlukan alokasi anggaran belanja modal yang semakin besar. Karena dengan semakin tingginya jumlah penduduk maka akan adanya peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Kepadatan Penduduk terhadap Pengalokasian Belanja Modal Secara Simultan

Secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal daerah dengan nilai probabilitas f-statistik sebesar 0,000000, nilai tersebut menunjukkan lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal. Hal ini sejalan dengan penelitian Devita dkk(2014) yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan jumlah penduduk secara bersama-sama berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Dan Permatasari (2016) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal. Sehingga dapat menjadi pendukung bagi penelitian ini.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dalam regresi linier berganda digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh dari variabel independent secara bersama – sama terhadap variabel dependent. Dalam regresi linier lebih dari dua variabel independent koefisien determinasi menggunakan R-square. Dari hasil pengujian *fixed effects* didapat nilai R-square sebesar 0,85 (85%) yang artinya sebesar 85% variabel belanja modal di jelaskan oleh variabel independen yang ada, dan sisanya 15% di jelaskan oleh variabel lain di luar dari model penelitian.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan didapati hasil sebagai berikut :

Secara simultan menunjukkan bahwa PAD, DBH dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Riau. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah juga masih mengandalkan dana perimbangan yang berasal dari pemerintah. Sedangkan secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Riau. Sementara PAD menunjukkan hasil positif namun tidak signifikan, hal ini menunjukkan bahwa PAD masih banyak digunakan untuk memenuhi belanja tidak langsung.

Saran

Adapun saran yang dapat di berikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagai berikut :

Bagi peneliti yang tertarik dengan permasalahan yang serupa di kemudian hari, di sarankan bagi peneliti untuk lebih menggunakan variabel yang lengkap dan bervariasi, dengan menambah variabel independen lain baik jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya ataupun menambahkan variabel non-keuangan lainnya seperti kebijakan pemerintah.

Bagi pemerintah daerah sendiri diharapkan lebih dapat meningkatkan belanja modal dengan lebih menggali potensi sumber-sumber pendapatan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah(PAD), sehingga pemerintah daerah akan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan.

Keterbatasan Penelitian

Adapun dalam melakukan penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebatas pada melihat pengaruhnya terhadap pengalokasian belanja modal berdasarkan tiga variabel saja yaitu : Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil serta Jumlah Penduduk. Dan penelitian ini hanya terbatas pada periode tahun, yang hanya meliputi tahun 2012-2016.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. F. (1998). Perimbangan Keuangan dan Tuntutan Kemandirian Daerah.
- Aisyah Najibah, Aris s, H. K. (2014). Analisis flypaper effect PAD dan DAU terhadap belanja daerah di provinsi kalimantan timur tahun 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 190–203. Retrieved from <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jep/article/view/3894/4315>
- Basuki, A. T. N. P. (2017). *Analisis regresi dalam penelitian ekonomi dan bisnis (dilengkapi aplikasi SPSS dan EVIEWS)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bird, R. M. & F. V. (2000). *Desentralisasi fiskal di negara-negara berkembang*. Jakarta: Gramedia.
- Eliza, P., & Jatmiko, R. (2016). Pengaruh dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten dan kota di jawa timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 46–58. Retrieved from <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jep/article/view/3843/4275>
- Hendra Kusuma. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(1), 1–92.
- Ida Nuraini. (2009). Potensi ketimpangan ekonomi antar kecamatan di kabupaten pasuruan.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mudrajad Kuncoro. (2010). *Masalah, kebijakan dan politik ekonomika pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Pratikno, T. (1998). Perimbangan Keuangan Pemerintah Alternatif (Suatu Pemilihan Proporsi Konkret Perimbangan Keuangan).
- Sudarti, & Malik, Nazaruddin, S. (2010). MODEL PENGUKURAN KINERJA EKONOMI DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN / KOTA DI JAWA TIMUR, 297–322.
- Sukirno, S. (1985). *Ekonomi pembangunan, proses, masalah dan dasar kebijaksanaan*. Jakarta: t.p.
- Tiyaningsih, A. A. (2009). Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Malang Tahun 20014-2008. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 85–100. Retrieved from <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jep/article/view/3586>
- Yandri, P. (2012). Yandri, Pitri Pelaksanaan otonomi daerah dan pelayanan publik bidang pendidikan di Kota Tangerang. *Ekonomika-Bisnis Vol.*, 3(2), 151–160.